

An aerial photograph of a large offshore oil drilling rig, painted in bright orange and yellow, situated in the middle of a dark blue sea. The rig has a tall derrick and various platforms. The text is overlaid on the right side of the image.

Catatan Daerah Sebagai Bahan Masukan Untuk Scoping Study Pelaporan EITI Tahun 2014

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Morrissey Hotel, 26 Oktober 2015

TRANSPARAN



HARAPAN

Es batu
Sirop moca
Irisan jeruk



Pm

2010 - 0,06
2011 - 0,08

Pr

Hak VS Kewajiban

S

PENYELUDUPAN MINYAK MENTAH

- **Jakarta** - Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengakui penyelundupan minyak mentah Dalam sebulan terakhir ini, Bea Cukai berhasil menggagalkan 4 tanker pembawa minyak mentah. Rabu, **26/09/2012** 16:05 WIB – Detik.com ---- kalau dilihat dari empat tanker dalam waktu yang berdekatan Anda bisa terjemahkan sendiri. .. ungkapinya.
- Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meyakini penyelewengan tersebut tidak hanya dilakukan di lingkup SKK Migas, namun ada kongkalikong dengan pihak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Menurutnya, sudah tentu hal tersebut merugikan penerimaan negara dan rakyat. "Penerimaan negara berkurang rakyat rugi, karena bagian negara di APBN berkurang, maka dampaknya alokasi dana ke rakyat juga kecil," ujar Marwan, Minggu (**18-8-2013** -Lampost).
- **TEMPO.CO, Jakarta** - Dua kapal masing-masing berbendera Republik Guinea Khatulistiwa dan Mongolia ditangkap patroli kantor Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan. Kedua kapal dengan 15 kru ini mengangkut sekitar 440 kiloliter minyak mentah Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan R. Fajar Donny memastikan kedua kapal dan muatannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dengan demikian, dari kegiatan ilegal ini, negara berpotensi mengalami kerugian negara... kata Fajar, Kamis, **16 Oktober 2014**.
- **Karimun, Kepri** (ANTARA News) - Aparat Bea Cukai Tanjung Balai Karimun menggagalkan penyelundupan 600.000 liter minyak mentah atau light crude oil yang diangkut kapal tanker MT L Power yang nilai ditaksir sekitar Rp5 miliar. (**22 Januari 2015**)

TEMUAN BPK TERHADAP COST RECOVERY

- Selama tahun **2000-2008**, potensi kerugian negara dari sektor migas mencapai Rp. 345,996 triliun. Kerugian negara dalam 8 tahun terakhir rata-rata sebesar 38,4 triliun per tahun, (berarti 3,2 triliun setiap bulan /1,7 miliar setiap hari). Sumber : kerugian terutama karena *mark up “cost recovery”*. (Release ICW (30/04/09) berdasarkan Data BPK – RI).
- DJKN telah melakukan penilaian aset-aset tersebut terhadap 78 KKKS dengan nilai wajar Rp214 triliun. Aset KKKS yang telah dinilai ini jauh lebih sedikit nilainya dibandingkan dengan pada saat pembeliannya
- **Tahun 2011** BPK melaporkan proyek fiktif biomediasi Chevron yang telah disetujui BP Migas, dengan potensi kerugian negara Rp2,6 triliun. Untuk tiga tahun terakhir 2010–2012, BPK melaporkan temuan hasil audit di BP Migas yang berpotensi merugikan negara sebesar USD230 juta atau sekitar Rp2,3 triliun. Puluhan triliun rupiah temuan BPK di atas berpotensi merugikan negara, karena sangat patut diduga telah dikorupsi.
- Hampir seluruh temuan berstatus mengambang tanpa tindak lanjut, tidak pernah terselesaikan, yang akhirnya akan menghilang di telan bumi seiring dengan berjalannya waktu. (Okezone. Senin, **19 Agustus 2013** 09:32 wib)
- KATADATA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakpatuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi terhadap ketentuan *cost recovery* dan perpajakan. Ketidakpatuhan ini berimbas pada berkurangnya penerimaan negara sebesar US\$ 81,61 juta atau Rp 994,8 miliar. Rinciannya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan *cost recovery* sebesar US\$ 68,56 juta dan terhadap perpajakan sebesar US\$ 13,06 juta. (**22 Mei 2014**)

PAJAK DAN ROYALTY PERTUM HILANG

- JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 60 persen perusahaan tambangan di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara, KPK bertekad memperkuat regulasi yang ada untuk meningkatkan tata kelola dan penerimaan negara dari sumber daya alam tersebut.
- “Hampir 60 persen perusahaan tambang tak bayar pajak dan royalti ke negara. Di Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, “kata Abraham saat menjadi pembicara dalam acara pembekalan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013)
- Kajian Sistem Pengelolaan PNBPN Minerba oleh KPK : Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar perhitungan kewajiban royalti

CATATAN

PERIZINAN DAN KONTRAK

- Perizinan di Tingkat Pemerintah Daerah yang potensial menimbulkan praktek korupsi dan menghambat investasi.
 - "Total izin di migas itu ada 341 izin, **tapi 101 izin ada di Pemda**. Sementara sisanya ada di kementerian dan lembaga negara. Namun saat ini izin di kementerian sudah dipangkas, di ESDM saja dari 52 sudah menjadi 42 izin," (KEN)
 - "**regulasi daerah tidak sejalan** dengan program percepatan produksi migas" (SKK Migas).
 - **Proses perizinan** oleh pemda setempat potensial menimbulkan praktek korupsi. (FGD Kejati Kaltim)

IZIN APA dan DIMANA.....?

- Kontrak PKP2B Generasi I (Lumpsum Payment) – Kontrak No. J2/Ji DU/40/82 tanggal 14 September 1982.

Pasal 11 butir 11.2 point iii menyatakan bahwa : luaran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pajak-pajak lainnya, imbalan atau pembayaran dalam bentuk pembayaran tahunan sekaligus, jumlah mana hanyalah sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu dolar AS) atau setara dalam rupiah setiap tahun yang dimulai sejak periode konstruksi. Angka US \$ 100.000 didasarkan pada nilai tukar dolar tahun 1982 dan harus disesuaikan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan dengan deflator yang diterbitkan oleh International BRD

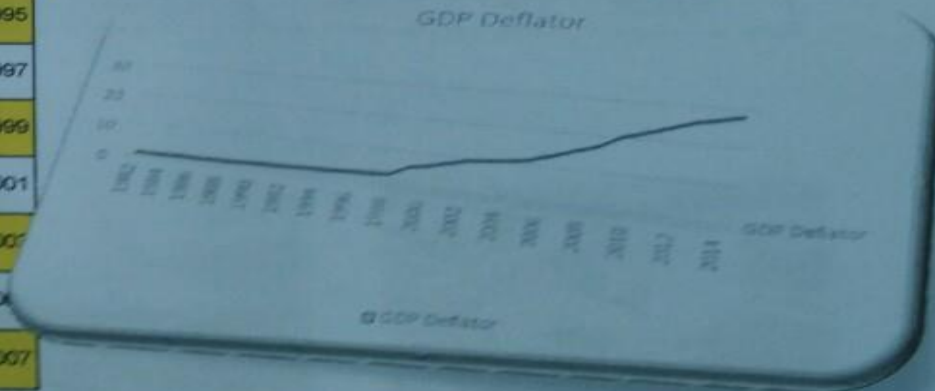
Perhitungan Deflator

- Perhitungan Deflator dari tahun 1982 s/d 2015

No	Tahun	Inflation (%)	Th Deflator sesuai KK	GDP Deflator	Lumpsum Payment Dasar	Lumpsum Payment	Tahun Pajak
1	1982	6.06	1982	1.00	50,000	50,000	1982, 1983
	1983	14.25					
2	1984	8.05	1983	1.14	50,000	57,125	1984, 1985
	1985	4.29		1.23	50,000		
3	1986	-0.1	1985	1.29	50,000	64,372	1986, 1987
	1987	15.44		1.29	50,000		
4	1988	12.75	1987	1.48	50,000	74,236	1988, 1989
	1989	9.99		1.67	50,000		
5	1990	7.72	1989	1.84	50,000	92,063	1990, 1991
	1991	8.83		1.98	50,000		
6	1992	5.38	1991	2.16	50,000	107,927	1992, 1993
	1993	8.88		2.27	50,000		
7	1994	7.78	1993	2.48	50,000	123,810	1994, 1995
	1995	9.7		2.67	50,000		
8	1996	8.85	1995	2.93	50,000	146,386	1996, 1997
	1997	12.57		3.19	50,000		
9	1998	75.27	1997	3.59	50,000	179,370	1998, 1999
	1999	14.16		6.29	50,000		
10	2000	20.45	1999	7.18	50,000	358,898	2000, 2001
	2001	14.3		8.65	50,000		
11	2002	5.9	2001	9.88	50,000	494,111	2002, 2003
	2003	5.49		10.47	50,000		
12	2004	8.55	2003	11.04	50,000	551,991	2004, 2005
	2005	14.33		11.98	50,000		
13	2006	14.56	2005	13.70	50,000	685,049	2006, 2007
	2007	11.26		15.63	50,000		

No	Tahun	Inflation (%)	Th Deflator sesuai KK	GDP Deflator	Lumpsum Payment Dasar	Lumpsum Payment	Tahun Pajak
14	2008	18.15	2007	17.39	50,000	869,578	2008, 2009
	2009	8.27		20.55	50,000		
15	2010	8.26	2009	22.25	50,000	1,112,373	2010, 2011
	2011	8.07		24.09	50,000		
16	2012	4.38	2011	26.03	50,000	1,301,438	2012, 2013
	2013	4.35		27.17	50,000		
17	2014		2013	28.43	50,000	1,421,500	2014, 2015
	2015				50,000		

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG>



Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Lumpsum Payment USD 50.0000

Tahun Pajak	Lumpsum Payment Dasar	Deflator	Lumpsum Payment setelah penyesuaian Deflator	Kurs	PBB Terutang	PBB yang telah dibayar	PBB Kurang Bayar
1	2	3	4(2x3)	5	6(4x5)	7	8(6-7)
2015	50,000	28.43	1,421,500	12,441	17,684,881,500	2,299,870,995	15,385,010,505
2014	50,000	28.43	1,421,500	12,225	17,377,837,500	2,162,654,789	15,215,182,711
2013	50,000	26.03	1,301,438	9,708	12,634,360,675	1,591,458,893	11,042,901,782
2012	50,000	26.03	1,301,438	9,069	11,802,741,755	1,360,885,684	10,441,856,071
2011	50,000	22.25	1,112,373	9,044	10,060,298,859	1,175,865,506	8,884,433,353
2010	50,000	22.25	1,112,373	9,502	10,569,765,564	640,784,522	9,928,981,042
Jumlah					80,129,885,853	9,231,520,389	70,898,365,464

PENGATURAN OPERASIONAL PENGUMPULAN ROYALTI dan PAJAK

- Self Assessment System, perhitungan kewajiban diserahkan sepenuhnya kepada wajib bayar.
- Kelemahan Self Assessment, perlu adanya kesadaran dan kejujuran yang tinggi
- Prasyarat Self Assessment, **keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum** merupakan hal yang paling penting, dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan

INSTRUMEN KETERBUKAAN

- Real Time Lifting
 - Sistem Monitoring Lifting Migas (SMLM)
 - Sudah dapat diikuti oleh ADPM
 - Daerah Penghasil mungkin akan dilaunching pada tanggal 22 Oktober 2015 di Semarang.
- Kertas Kerja Lifting
- Rekonsiliasi Bukti Setor Royalti

REALISASI BAGI HASIL INDUSTRI EKSTRAKTIF BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009-2015

JENIS PENERIMAAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (s.d. Semester I)
LANDRENT	4.017.684.869	4.263.384.113	8.362.586.944	8.423.850.947	9.503.806.971	17.578.414.629	18.321.086.420
ROYALTI	680.219.277.529	692.305.162.912	1.017.871.254.941	1.251.862.563.282	1.395.943.356.746	1.155.417.003.269	1.094.491.549.545
MINYAK BUMI	492.717.001.374	853.961.773.726	938.593.512.596	904.024.059.435	767.138.606.731	567.911.257.278	145.082.505.948
GAS ALAM	1.328.199.868.541	2.036.377.808.715	2.517.752.693.827	3.069.422.009.446	2.245.642.181.021	1.748.673.065.577	557.798.040.272
JUMLAH	2.505.153.832.313	3.586.908.129.466	4.482.580.048.308	5.233.732.483.110	4.418.227.951.469	3.489.579.740.753	1.815.693.182.185

REALISASI LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

TRIWULAN I TAHUN 2015

No.	Daerah Kab/Kota Penghasil	LIFTING MINYAK BUMI			GROSS REVENUE	LIFTING PEMERINTAH (Ribu US \$)
		Prognosa 2015 (Ribu Barel)	Realisasi TW I Tahun 2015 (Ribu Barel)	%	Realisasi TW I THN 2015 (Ribu US \$)	
1	Provinsi Kaltim (4-12 mil)	11.727,00	3.461,78	29,52	190.943,24	101.395,35
2	Kota Samarinda	118,17	82,,9	69,72	4.515,02	1.585,42
3	Kab. Kutai Kartanegara	18.102,84	4.740,31	26,19	257.269,49	94.103,73
4	Kab. Kutai Timur	476,11	111,62	23,44	6.373,64	783,81
5	Kab. Penajam Paser Utara	836,38	255,53	30,55	13.423,46	13.423,46
6	Kota Bontang	175,48	175,48	24,82	9.850,46	(1.800,36)
JUMLAH		31.967,41	8.827,11	27,61	482.375,30	209.491,40

No.	Daerah Kab/Kota Penghasil	LIFTING GAS BUMI			GROSS REVENUE	LIFTING PEMERINTAH (Ribu US \$)
		Prognosa 2015 (Ribu Barel)	Realisasi TW I Tahun 2015 (Ribu Barel)	%	Realisasi TW I THN 2015 (Ribu US \$)	
1	Provinsi Kaltim (4-12 mil)	217.551,38	54.511,60	25,06	561.646,02	162.415,57
2	Kota Samarinda	1.009,91	501,80	49,69	3.435,45	821,45
3	Kab. Kutai Kartanegara	390.009,49	82.257,15	21,86	897.085,40	242.552,71
4	Kab. Penajam Paser Utara	12.717,12	2.655,99	20,89	15.130,27	3.654,20
5	Kota Bontang	192,97	687,54	356,29	6.393,00	397,73
JUMLAH		621.480,87	143.614,07	23,11	1.483.690,14	410.841,66

DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH DARI SDA MINYAK BUMI) TRIWULAN I TAHUN 2015**PERIODE : DESEMBER 2014 s.d. FEBRUARI 2015**

NO.	KAB/KOTA PENGHASIL	KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA	JENIS MINYAK MENTAH	PROGNOSA LIFTING*)		TRIWULAN I (DES 2014 s.d. FEB 2015)			PENCAPAIAN SASARAN (%)	PERKIRAAN LIFTING PEMERINTAH (PROPORSIONAL)	
				APBN 2015		LIFTING	WAP	GROSS REVENUE		(BAREL)	(US\$)
				(Ribu Barel)	(MBPD)	(BAREL)	(US\$/Bbl)	(US\$)			
I.	KALIMANTAN TIMUR			20.240,41	55,45	5.365.334,38	54,32	291.432.059,38	26,51%	2.039.073,09	108.096.056,82
	1 KOTA SAMARINDA			118,17	0,32	82.390,32	54,80	4.515.017,37	69,72%	29.170,69	1.585.416,97
		VICO		102,75	0,28	73.949,00	54,87	4.057.431,84	71,97%	28.031,58	1.529.144,21
			Badak	62,80	0,17	56.695,00	55,47	3.144.857,62	90,28%	28.031,58	1.529.144,21
			BRC	39,96	0,11	17.254,00	52,89	912.574,22	43,18%	0,00	0,00
		PT PERTAMINA EP – SEMCO (SEMBERAH)	Sangatta	7,99	0,02	2.419,69	56,57	138.881,89	30,28%	326,52	16.833,40
		PERTAMINA EP	Pam.Sng2.Mix	7,43	0,02	6.021,63	53,26	320.703,64	81,04%	812,59	39.439,35
	2 KAB. KUTAI KARTANEGARA			18.102,84	49,60	4.740.313,65	54,27	257.269.487,76	26,19%	1.7771.074,49	94.103.726,19
		PERTAMINA EP	Pam.Sng2.Mix	3.140,68	8,60	739.773,83	54,15	40.056.022,46	23,55%	99.828,61	4.925.991,88
		VICO		3.999,85	10,96	1.211.639,00	54,23	65.705.7888,08	30,29%	510.822,42	27.366.378,31
			Badak	3.315,57	9,08	1.033.159,00	54,48	56.282.044,90	31,16%	510.822,42	27.366.378,31
			BRC	684,27	1,87	178.480,00	52,80	9.423.743,18	26,08%	0,00	0,00
		TOTAL INDONESIA		5.213,44	14,28	1.364.424,83	54,27	74.052.807,29	26,17%	580.478,95	31.566.286,69
			Handil Mix	1.124,24	3,08	715.786,94	53,90	38.581.398,86	63,67%	426.331,46	22.224.457,12
			Senipah Kond	2.393,54	6,56	276.331,89	56,91	15.725.384,87	11,54%	123.775,03	6.967.936,67
			BRC	964,43	2,64	336.077,53	52,75	17.728.092,63	34,85%	22.185,43	1.965.514,06
			Badak	101,33	0,28	34.500,00	55,64	1.919.675,00	34,05%	7.500,00	374.915,00
			Bekapai	629,90	1,73	1.728,46	56,85	98.255,92	0,27%	707,03	33.463,83
		INPEX		5.213,44	14,28	1.364.424,83	54,27	74.052.807,29	26,17%	571.803,68	29.824.848,55
			Handil Mix	1.124,24	3,08	715.786,94	53,90	38.581.398,86	63,67%	383.082,71	19.638.267,81
			Senipah Kond	2.393,54	6,56	276.331,89	56,91	15.725.384,87	11,54%	201.192,02	11.643.790,87
			BRC	964,43	2,64	336.077,53	52,75	17.728.092,63	34,85%	(22.185,43)	(1.965.514,07)
			Badak	101,33	0,28	34.500,00	55,64	1.919.675,00	34,05%	8.500,00	437.045,00
			Bekapai	629,90	1,73	1.728,46	56,85	98.255,92	0,27%	1.214,38	71.258,94

*) Keputusan Menteri ESDM No.4042 K/80/MEM/2014 Tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015

NO.	KAB/KOTA PENGHASIL	KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA	JENIS MINYAK MENTAH	PROGNOSA LIFTING*)		TRIWULAN I (DES 2014 s.d. FEB 2015)			PENCAPAIAN SASARAN (%)	PERKIRAAN LIFTING PEMERINTAH (PROPORSIONAL)	
				APBN 2015		LIFTING	WAP	GROSS REVENUE		(BAREL)	(US\$)
				(Ribu Barel)	(MBPD)	(BAREL)	(US\$/Bbl)	(US\$)			
	2 KAB. KUTAI KARTANEGARA	PT PERTAMINA EP – SEMCO (SEMBERAH)	Sangatta	304,24	0,83	60.327,07	56,64	3.417.052,48	19,83%	8.140,82	420.220,77
		CHEVRON IND. CO. – EAST KAL		231,19	0,63	(275,90)	54,33	(14.989,84)	-0,12%	0,00	0,00
			Attaka	142,15	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			BRC	89,04	0,24	(275,90)	54,33	(14.989,84)	-0,31%	0,00	0,00
	3 KAB. KUTAI TIMUR	PT PERTAMINA EP	Sangatta	476,11	1,30	111.621,69	57,10	6.373.640,75	23,44%	15.062,76	783.814,78
	4 KAB. PENAJAM PASER UTARA	CHEVRON IND. CO. – EAST KAL	Sepinggan	836,38	2,29	255.525,30	52,53	13.423.455,99	30,55%	255.525,30	13.423.456,02
		CHEVRON IND. CO. – EAST KAL	Sepinggan	836,38	2,29	255.525,30	52,53	13.423.455,99	30,55%	255.525,30	13.423.456,02
	5 KOTA BONTANG	CHEVRON IND. CO. – EAST KAL	Attaka	706,91	1,94	175.483,43	56,13	9.850.457,51	24,82%	(31.760,15)	(1.800.357,14)

DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH DARI SDA MINYAK BUMI) TRIWULAN I TAHUN 2015
PERIODE : DESEMBER 2014 s.d. FEBRUARI 2015

NO.	B. WILAYAH LAUT 4 s.d. 12 MIL	KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA	JENIS MINYAK MENTAH	PROGNOSA LIFTING*)		TRIWULAN I (DES 2014 s.d. FEB 2015)			PENCAPAIAN SASARAN (%)	PERKIRAAN LIFTING PEMERINTAH (PROPORSIONAL)	
				APBN 2015		LIFTING	WAP	GROSS REVENUE		(BAREL)	(US\$)
				(Ribu Barel)	(MBPD)	(BAREL)	(US\$/Bbl)	(US\$)			
I.	PROV. KALIMANTAN TIMUR			11.727,00	32,13	3.464.777,76	55,16	190.943.235,82	29,52%	1.859.703,48	101.395.345,78
		CHEVRON IND. CO. – EAST KAL		3.125,37	8,56	927.781,05	53,87	49.983.113,01	29,69%	563.802,08	29.335.425,14
			Ataka	1.276,79	3,50	307.965,45	56,64	17.444.403,86	24,12%	(55.737,62)	(3.188.294,24)
			Sepinggan	1.835,99	5,03	619.539,70	52,50	32.523.719,32	33,74%	619.539,70	35.523.719,38
			BRC	12,58	0,03	275,90	54,33	14.989,84	2,19%	-	-
		TOTAL INDONESIA		3.929,51	10,77	1.168.918,36	55,54	64.918.629,69	29,75%	4331.337,97	23.006.244,62
			Handil Mix	864,17	2,37	24.229,64	53,79	1.303.398,69	2,80%	14.431,47	750.810,73
			Senipah Kond	1.839,83	5,04	550.041,70	55,94	30.769.594,57	29,90%	246.335,76	13.634.043,81
			BRC	741,33	2,03	211.846,95	52,71	11.166.862,11	28,58%	13.984,62	1.238.070,27
			Bekapai	484,19	1,33	382.800,06	56,63	21.678.774,34	79,06%	156.586,12	7.383.319,82
		INPEX		4.672,13	12,80	1.365.078,36	55,70	76.041.493,12	29,22%	864.563,44	49.053.676,03
			Handil Mix	864,17	2,37	24.229,64	53,79	1.303.398,68	2,80%	12.967,48	663.441,27
			Senipah Kond	1.839,83	5,04	550.041,70	55,94	30.769.594,57	29,90%	400.474,96	22.783.208,63
			BRC	741,33	2,03	211.846,95	52,71	11.166.862,11	28,58%	(13.984,62)	(1.238.070,28)
			Bekapai	484,19	1,33	382.800,06	56,63	21.678.774,34	79,06%	268.946,38	15.722.273,65
			Ataka	742,62	2,03	196.160,00	56,70	11.122.863,43	26,41%	196.159,23	11.122.822,75

**PERHITUNGAN REALISASI ALOKASI LIFTING GAS BUMI
(DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH DARI SDA GAS BUMI)
TRIWULAN I TAHUN 2015 (DESEMBER 2014 s/d FEBRUARI 2015)**

NO.	DAERAH PENGHASIL 0 – 4 MIL	KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA	PROG LIFT THN 2015 (*)	REALISASI TRIWULAN I/2015 (PERIODE DES 2014 – FEB 2015)					
				LIFTING	WAP	GROSS REVENUE	NETBACK	LIFTING PEMERINTAH	PENCAPAIAN
				RIBU MMBTU	MMBTU	US\$/MMBTU	US\$	US\$	%
I.	KALIMANTAN TIMUR		403.929,49	89.102.479,18	10,35	922.044.117,14	862.952.068,14	248.426.089,11	22,06
	1. KOTA SAMARINDA		1.009,91	501.800,63	6,85	3.435.448,84	3.182.267,25	821.448,53	49,69
		VICO INDONESIA	256,94	335.937,55	8,77	2.947.811,38	2.694.629,79	690.192,26	130,74
		PERTAMINA EP-TAC-SEMCO/EMP	752,96	165.863,08	2,94	487.637,46	487.637,46	131.256,27	22,03
	2. KAB. KUTAI KARTANEGARA		390.009,49	85.257.148,35	10,52	897.085.396,20	839.001.917,47	243.552.710,02	21,86
		VICO	113.153,77	25.649.024,98	10,70	274.361.704,26	257.106.682,11	63.635.738,62	22,67
		TOTAL E&P INDONESIA	136.644,30	28.749.170,21	10,48	301.301.838,64	281.845.445,89	89.670.327,49	21,04
		CHEVRON INDONESIA (CICO) EAST KAL	3.972,04	2.076.334,59	9,57	19.869.154,83	17.953.480,87	453.834,34	52,27
		INPEX PETROLEUM	136.239,38	28.749.170,21	10,48	301.301.835,70	281.845.445,83	89.724.248,09	21,10
		VICO SANGA-SANGA (CBM)	-	33.448,37	7,50	250.862,76	250.762,76	68.561,48	-
	3. KAB. PENAJAM PASER UTARA		12.717,12	2.655.988,59	5,70	15.130.274,29	14.978.206,41	3.654.199,66	20,89
		CHEVRON INDONESIA COMPANY – EAST KALIMANTAN	12.528,08	2.576.786,56	5,72	14.750.104,58	14.750.104,58	3.540.148,75	20,57
		PERUSDA BENUO TAKA	189,04	79.202,02	4,80	390.169,71	228.101,83	114.050,91	41,90
	4. KOTA BONTANG	CHEVRON INDONESIA COMPANY – EAST KALIMANTAN	192,97	687.541,61	9,30	6.392.997,80	5.789.667,01	397.730,91	356,29

NO.	WILAYAH LAUT 4 – 12 MIIL	KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA	PROG LIFT THN 2015 (*)	REALISASI TRIWULAN I/2015 (PERIODE DES 2014 – FEB 2015)					
				LIFTING	WAP	GROSS REVENUE	NETBACK	LIFTING PEMERINTAH	PENCAPAIAN
				RIBU MMBTU	MMBTU	US\$/MMBTU	US\$	US\$	%
I.	PROV. KALIMANTAN TIMUR		217.551,38	54.511.595,72	10,30	561.646.019,02	477.572.798,43	162.415.567,48	25,06
		CHEVRON INDONESIA COMPANY – EAST KALIMANTAN	8.320,16	3.235.938,24	6,93	22.416.453,44	21.618.418,05	3.461.708,44	38,89
		TOTAL E&P INDONESIA	103.625,16	25.474.538,61	10,53	268.229.743,61	226.596.226,88	79.073.094,22	24,58
		INPEX PETROLEUM	105.606,07	25.601.118,87	10,50	270.999.821,97	229.358.153,51	79.880.764,82	24,43

(*) SK MENTERI ESDM Nomor : 4042 K/80/MEM/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil dari Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2015

- Rekonsiliasi Bukti Setor Royalti
 - Pasca UU No. 23 menarik kewenangan Kab/Kota ke Provinsi tanpa masa peralihan.
- Aplikasi Simponi (Sistem Pembayaran PNPB Online)
 - Di kas negara ada, tapi di ESDM belum ada buset
 - Di kas negara tidak ada, tapi di ESDM sudah ada buset

MANAGEMENT PENDAPATAN

Kompasiana (17 Maret 2015) : [Khairunisa Maslichul](#)

masih maraknya praktek mafia migas hingga saat ini. **Pelakunya lihai memanfaatkan banyak celah terbuka dalam proses lifting migas** untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing.

Ironisnya, padahal pada proses *lifting* inilah negara menerima pendapatan dari kegiatan hulu migas sehingga *lifting* migas merupakan tolok ukur utama kinerja industri hulu migas. **Jika proses *lifting* migas tidak transparan apalagi efisien, bisa dipastikan kas negara dari sektor migas juga akan berkurang.**

- Menghitung hak secara akurat
- Meter Rumah, Meter Gardu dan Meter Gardu Induk pada PLN

Dasar Penentuan Target PAJAK DAERAH

JENIS PAJAK	OBJEK PAJAK	NILAI PAJAK	TARIF PAJAK	PENDAPATAN
PKB	200	100	2	2000,00
BBNKB	10	150	12,5	178,50
PBBKB	100	74	5	370,00
AIR PERMUKAAN	50	50	5	125,00

Contoh :

- PBBKB :
1. Objek Pajak didapat dari perkalian Unit Kendaraan dengan Rata-Rata Konsumsi
 2. Market Share dari masing2 WAPU
 3. Data Penjualan Pertamina/SPBU dan Pemberitahuan Impor Barang

POTENSI KEKURANGAN DBH ROYALTI Bagian Provinsi Kalimantan Timur

US \$		2011	2012	2013	2014
Realisasi Ekspor		17.143.704.033	16.787.542.947	16.022.616.720	11.939.060.000
DPB	6,5	1.114.340.762	1.091.190.292	1.041.470.087	776.038.900
Royalti	7	1.200.059.282	1.175.128.006	1.121.583.170	835.734.200
DBH Daerah	80	960.047.426	940.102.405	897.266.536	668.587.360
Provinsi	16	153.607.588	150.416.385	143.562.646	106.973.978
kurs rata2		8.800	9.400	10.500	11.900
Potensi Royalti		1.351.746.775.594	1.413.914.017.168	1.507.407.781.018	1.272.990.333.440
Realisasi Royalti		1.017.871.254.941	1.251.862.563.282	1.395.943.356.746	1.155.417.003.269
Kekurangan		333.875.520.653	162.051.453.886	111.464.424.272	117.573.330.171

Besaran royalti yang disetor tergantung dari volume dan kalori,
jika volume kecil dan kalori rendah royalti akan kecil

MANAGEMENT PENGELUARAN

- Mekanisme Transfer

Pasal 30 PMK No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah Dan Dana Desa ayat (5) dan (6) :

- Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup kurang bayar atas perhitungan PNPB SDA tahun-tahun sebelumnya yang baru teridentifikasi daerah penghasilnya.
 - Kurang Bayar DBH disampaikan oleh DJPK kepada DJA untuk dianggarkan dalam APBN Perubahan atau APBN Tahun berikutnya
- Kurang Bayar DBH Kaltim **dicicil** (tahun 2014 dan 2015 atas kurang bayar tahun 2013)
 - Perlu Rekonsiliasi antara hak pemerintah, realisasi pendapatan dengan penyaluran hak daerah

LATAR BELAKANG DIBENTUK EITI

- Pada saat rakyat dan masyarakat lokal tempat lokasi SDA tersebut cenderung miskin dan hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk, para penguasa negara dan segelintir elit negara tersebut cenderung hidup mewah dan diluar batas kewajaran.
- Bukan hanya sekedar **transparansi**, tetapi juga masalah **distribusi** (KEADILAN)
 - Keadilan antar daerah
 - Keadilan antara pusat dan daerah

Keadilan DBH Migas

a. Menyeimbangkan DBH Migas On Shore dan Off shore 4 – 12 ml	Bagi Hasil SDA terutama Migas belum memberikan rasa keadilan terutama bagi daerah penghasil jika dibandingkan dengan bagian pusat (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur bagi hasil minyak bumi dan gas bumi (15,5 dan 30,5 persen bagi daerah) dan bahkan jika dibandingkan dengan bagian daerah Papua dan NAD. (70 daerah 30 pusat)
--	---

No	Jenis Penerimaan SDA	UU 33/2004				UU Otonomi Khusus	
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	Pemerataan Kab/Kota lainnya	NAD	Papua Barat
1.	Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2	70	70
2.	Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2	70	70

PERHITUNGAN PEMBAGIAN ROYALTY KE DAERAH

Jenis Pendapatan	MODEL LAMA			MODEL BARU	
	Besaran	Kalori	Penerima	Besaran	Penerima
DHPB	13.50%			13.50%	
Dana Pengembangan Batubara (Keppres No.75 Tahun 1996)	6,5-10%		Pusat	DIHAPUS	
Royalty	3%	≤ 5100		13.50%	
(PP No. 9 Tahun 2012)	5%	< 5100 - 6100			
	7%	< 6100			
(Pembagian)	20%		Pusat	20%	Pusat
(UU No. 33 Tahun 2004)	32%		Daerah Penghasil	32%	Daerah Penghasil
	32%		Non Daerah Penghasil	32%	Non Daerah Penghasil
	16%		Provinsi	16%	Provinsi

TRANSPARANSI

BUKAN HANYA SATU SISI yaitu : KETERSEDIAN DATA BAYAR dan TERIMA serta DAPATNYA DATA TERSEBUT DI UJI/VALIDASI, TETAPI **KETEPATAN PEMBAYARAN** (sebagai sisi lainnya – kesesuaian dengan KEWAJIBAN) serta INSTRUMENT UNTUK MENDAPATKAN DATA MENJADI BAGIAN YANG PENTING UNTUK DISINGKAP TIRAINYA

Sekian, Terimakasih